



DAMPAK BELANJA SUBSIDI DAN BANTUAN SOSIAL DARI APBD TERHADAP KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Sandi Asep Ramdani¹

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Alamat Korespondensi: sandi.ramdani@kemenkeu.go.id

Abstract

Creating equitable development is one of the Government's policy priorities. This research analyzes the influence of subsidy spending and social assistance from the APBD on income inequality as measured using the Gini coefficient with control variables, namely capital expenditure and education (average years of schooling). Panel data regression with Ordinary Least Square (OLS) with Robust Standard Error and Difference in Differences (DiD) was used to analyze data from 34 Provinces in Indonesia in the 2007-2022 period. The results of data analysis using OLS show that spending on subsidies, social assistance and capital has a positive effect on the Gini coefficient, while education has a negative effect on the Gini coefficient. Meanwhile, DiD's analysis shows that provinces with higher actual spending on subsidies and social assistance than the national average have higher income gaps in the 2015-2022 period. Based on these findings, there are indications that the distribution of subsidies and social assistance is still not on target. The Government needs to improve the subsidy spending scheme, improve data on social assistance recipients, and strengthen monitoring and supervision in its distribution.

Abstrak

Menciptakan pemerataan Pembangunan merupakan salah satu prioritas kebijakan Pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini dengan variabel kontrol yaitu belanja modal dan pendidikan (rata-rata lama sekolah). Regresi data panel dengan *Ordinary Least Square* (OLS) with *Robust Standard Error* dan *Difference in Differences* (DiD) digunakan untuk menganalisis data dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode 2007-2022. Hasil analisis dengan OLS menunjukkan bahwa Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan modal berpengaruh positif terhadap koefisien gini, sedangkan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap koefisien gini. Sementara itu, analisis dengan DiD menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki realisasi belanja subsidi dan bantuan sosial lebih tinggi dari rata-rata nasional justru memiliki Kesenjangan Pendapatan yang lebih tinggi pada periode 2015-2022. Berdasarkan temuan tersebut,



terdapat indikasi bahwa penyaluran subsidi dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Pemerintah perlu menyempurnakan kembali skema belanja subsidi, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan memperkuat monitoring dan pengawasan dalam penyalurannya.

Keywords: Subsidi, Bantuan Sosial, Modal, Rata-Rata Lama Sekolah, Koefisien Gini

JEL Classification: H55, H72, H76

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi satu-satunya indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, karena pemerataan ekonomi juga merupakan salah satu indikator pembangunan yang juga sangat penting (Juliana et al., 2018). Pemerataan pembangunan ekonomi telah menjadi prioritas utama dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimana arah pembangunan nasional diprioritaskan pada penguatan ekonomi nasional yang memiliki asas demokrasi dan didasarkan pada ekonomi pasar yang adil (*equity* dan *equality*).

Sebagai implementasi dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, berbagai kebijakan telah ditetapkan sejak periode pertama Pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2014 silam. Pada tahun 2015, Program Dana Desa mulai diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan yang dimulai dari daerah perdesaan. Setelah itu, berbagai program dan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi terus dilakukan seperti Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dengan tiga pilar (lahan, kesempatan dan SDM), Penetapan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dan program lainnya.

Untuk mendukung program pemerataan ekonomi di tingkat nasional tersebut, pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi dapat tercipta di wilayahnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan subsidi terhadap barang-barang kebutuhan dasar masyarakat, dan memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dapat dilihat dari realisasi belanja subsidi dan belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan cukup signifikan selama periode 2014-2022. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi belanja Subsidi dari APBD pada tahun 2014 adalah sebesar Rp628 miliar dan meningkat sebesar 8 kali lipat menjadi Rp6,03 triliun di 2022. Demikian halnya dengan belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan dari Rp7,31 Triliun pada 2014, menjadi Rp11,35 Triliun pada 2022.

Selain itu, selama periode 2014-2022 total realisasi belanja subsidi dari APBD adalah sebesar Rp28,18 Triliun

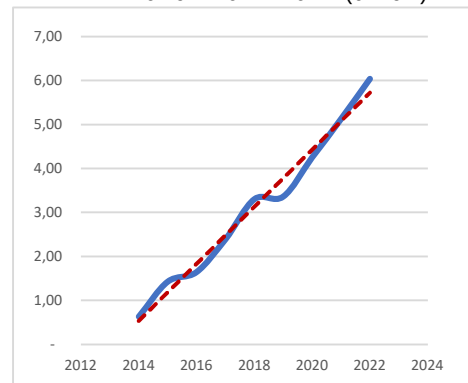
atau 0,30% dari total realisasi belanja APBD pada periode tersebut. Sedangkan total realisasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD selama periode tersebut adalah sebesar Rp93,47 Triliun atau 0,98% dari total realisasi belanja APBD. Sehingga secara total, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial dari APBD yang telah direalisasikan selama periode Pemerintahan Jokowi di tahun 2014-2022 adalah sebesar Rp121,66 Triliun atau 1,28% dari total realisasi APBD.

Selanjutnya, salah satu *output* dari realisasi belanja subsidi dan belanja bantuan sosial selama periode 2014-2022 tersebut dapat dilihat dari menurunnya rata-rata tingkat Kesenjangan Pendapatan di Indonesia yang dapat diukur dengan nilai koefisien gini. Berdasarkan Grafik 3, dapat dilihat bahwa koefisien gini Indonesia adalah sebesar 0,410 pada tahun 2014 dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun setelahnya sampai dengan tahun 2019. Meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan karena Covid-19, namun setelahnya nilai koefisien gini kembali mengalami penurunan sehingga secara kumulatif koefisien gini Indonesia mengalami penurunan sekitar 7% selama tahun 2014-2020.

Namun demikian, jika ditinjau data koefisien gini provinsi di Indonesia, dapat dilihat bahwa kesenjangan pendapatan relatif tidak mengalami perubahan berarti selama periode 2014-2022 meskipun belanja subsidi dan belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp121,66 Triliun (Tabel 1).

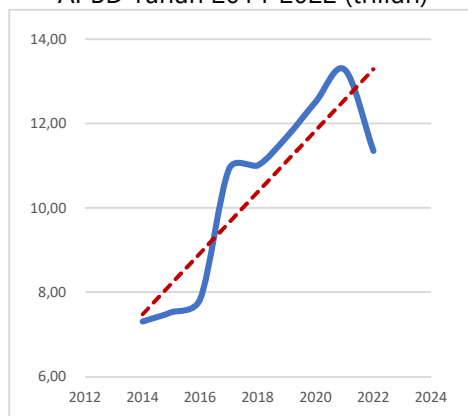
Jika dilihat pada Tabel 1, dapat diamati bahwa pada tahun 2014 dan

Grafik 1 Realisasi Belanja Subsidi dari APBD Tahun 2014-2022 (triliun)



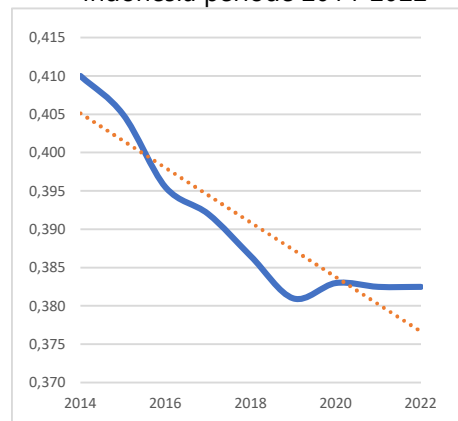
Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah peneliti)

Grafik 2 Realisasi Belanja Bansos dari APBD Tahun 2014-2022 (triliun)



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah peneliti)

Grafik 3 Rata-rata Koefisien Gini Indonesia periode 2014-2022



Sumber: BPS (diolah peneliti)

tahun 2022, dari lima besar provinsi yang memiliki kesenjangan tertinggi, terdapat provinsi yang selalu menempati urutan lima besar yaitu Provinsi Papua, Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta, bahkan untuk Provinsi Gorontalo selama periode tersebut hanya mengalami penurunan kesenjangan sebesar 0,12 poin. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa provinsi di Indonesia masih kesulitan untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan pada masyarakatnya.

Adapun berdasarkan teori pada beberapa literatur, diketahui terdapat bukti kuat bahwa pengeluaran pemerintah secara umum berpengaruh pada penurunan tingkat Kesenjangan Pendapatan di berbagai negara dengan hubungan paling kuat terjadi pada belanja kesejahteraan sosial (Anderson et al., 2017). Penelitian di beberapa negara berkembang juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan dan pembangunan berpengaruh terhadap penurunan tingkat Kesenjangan Pendapatan (Sidek, 2021).

Namun demikian, beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia memiliki hasil yang beragam. Penelitian oleh Astarly et al. (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara

umum memiliki pengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. Sedangkan penelitian oleh Abimanyu & Imansyah (2023) menunjukkan bahwa Belanja Subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi sehingga justru memperparah Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Penelitian oleh Alamanda (2020) juga menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial, subsidi dan hibah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat gap antara teori hubungan pengeluaran pemerintah terhadap Kesenjangan Pendapatan dengan beberapa hasil penelitian di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian di Indonesia berkaitan dengan pengaruh belanja bantuan sosial dan subsidi pemerintah juga terdapat gap karena memiliki hasil yang beragam, sehingga penelitian kali ini akan mencoba mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dengan pendekatan berbeda yaitu membandingkan dua periode pemerintahan di Indonesia dengan menganalisis pengaruh belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD masing-masing provinsi terhadap Koefisien Gini dari provinsi tersebut selama periode

Tabel 1 Besar Provinsi dengan Koefisien Gini Tertinggi di Indonesia Periode Tahun 2014 dan 2022

No	Provinsi	Koefisien Gini 2014	No	Provinsi	Koefisien Gini 2022
1	Sulawesi Selatan	0,437	1	DI Yogyakarta	0,449
2	DKI Jakarta	0,434	2	Gorontalo	0,421
3	Papua	0,434	3	DKI Jakarta	0,418
4	Gorontalo	0,433	4	Jawa Barat	0,415
5	Sulawesi Utara	0,430	5	Papua	0,399

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah peneliti)

pemerintahan Jokowi (2015-2022) dengan pembandingan dari periode pemerintahan sebelumnya (2007-2014). Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis terhadap pengaruh dari belanja pemerintah pada fungsi sosial dan subsidi terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data terkini.

Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah beberapa provinsi di Indonesia mengalami stagnasi koefisien gini selama periode 2014-2022, sehingga terdapat indikasi bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial yang direalisasikan selama ini tidak tepat sasaran karena tidak menekan angka kesenjangan di Provinsi Indonesia. Paket kebijakan pemerataan ekonomi yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi juga terindikasi belum mampu menurunkan angka kesenjangan pendapatan di daerah secara signifikan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengukur dampak dari belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari variabel lain yaitu Belanja Modal dan Pendidikan (rata-rata lama sekolah) terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia, menganalisis dampak (*Impact Analysis*) dari kebijakan pemerataan ekonomi dari pemerintahan Jokowi melalui belanja subsidi dan bantuan sosial dibandingkan pemerintahan sebelumnya, memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

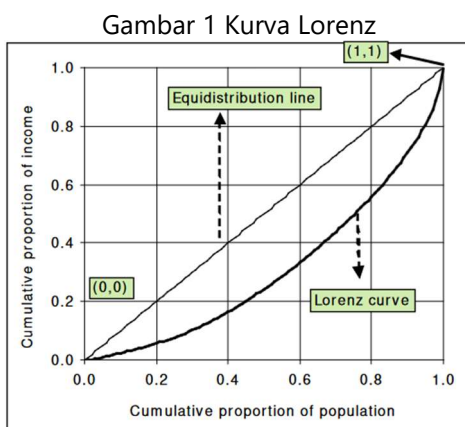
Kesenjangan Pendapatan

Dalam teori ekonomi, terdapat konsep distribusi pendapatan yang dikemukakan oleh Pareto (1906) yang menyatakan bahwa pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat memiliki kecenderungan untuk terdistribusi secara tidak merata dimana sebagian kecil masyarakat memiliki sebagian besar kekayaan sementara sebagian besar lainnya hanya memiliki sebagian kecil dari kekayaan sehingga pada akhirnya mengakibatkan adanya Kesenjangan Pendapatan pada masyarakat, konsep ini biasa disebut dengan teori distribusi pareto (Arnold, 2015; Wuladari et al., 2022).

Menurut teori yang dikemukakan pertama kali oleh Kuznets (1955), disebutkan bahwa terdapat hubungan yang khas antara pertumbuhan ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan seiring waktu. Teori ini menyebutkan bahwa pada awal masa pembangunan ekonomi di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan karena sebagian kecil dari populasi yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat (misalnya, sektor industri) memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada sebagian besar populasi yang masih berada di sektor yang masih tradisional dan kurang berkembang (misalnya, sektor pertanian). Namun demikian, seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, Kesenjangan Pendapatan akan mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun ketika terjadi peningkatan Pendidikan, industrialisasi,

dan mobilitas sosial pada masyarakat (Ota, 2017).

Untuk mengetahui tingkat Kesenjangan Pendapatan pada suatu wilayah, digunakan konsep yang dikemukakan oleh ekonom Max O. Lorenz (1905) yang mengumpulkan data kekayaan individu dalam suatu populasi masyarakat dan membaginya ke dalam beberapa kelompok pendapatan kemudian menggambarkannya dalam sebuah grafik sehingga membentuk suatu kurva yang disebut Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*). Kurva Lorenz terletak di bawah garis diagonal 45-derajat yang menggambarkan seberapa jauh distribusi pendapatan aktual suatu masyarakat dari distribusi pendapatan yang merata sempurna, sehingga tingkat Kesenjangan Pendapatan yang lebih besar diindikasikan oleh kurva yang lebih jauh dari garis diagonal tersebut (Bellu & Liberati, 2005).



Sumber: Bellu & Liberati (2005)

Melalui Kurva Lorenz tersebut, dapat diketahui pula tingkat kesenjangan pendapatan secara numerik yang dilakukan dengan menghitung rasio antara luas daerah di bawah Kurva Lorenz dengan luas segitiga yang dibentuk oleh garis

diagonal 45-derajat dan Kurva Lorenz atau biasa disebut dengan Rasio Gini atau Koefisien Gini. Koefisien Gini atau Rasio Gini memiliki nilai antara nol dan satu. Nilai koefisien gini yang semakin mendekati angka satu memberikan indikasi bahwa tingkat Kesenjangan Pendapatan yang semakin tinggi (Sitthiyot & Holasut, 2021).

Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial

Untuk mengurangi permasalahan kesenjangan pendapatan, Pemerintah melakukan kebijakan redistribusi pendapatan dengan memungut pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi untuk selanjutnya didistribusikan kembali kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui instrumen belanja subsidi atau belanja bantuan sosial. Dengan kebijakan tersebut, tingkat kesejahteraan bersama (*social welfare*) diharapkan akan dapat tercapai ketika *marginal utility* masyarakat berpenghasilan tinggi dari pembayaran pajak sama dengan *marginal utility* masyarakat penerima Bantuan Sosial (Rosen & Gayer, 2014).

Menurut Spencer & Amos Jr (1993) pada Soen et al. (2022), Belanja Subsidi adalah suatu pembayaran (dalam bentuk apapun) yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada suatu perusahaan atau rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Sedangkan menurut Kemendagri (2020), belanja subsidi bertujuan untuk mengatur harga jual dari barang/jasa tertentu yang dihasilkan oleh badan usaha baik itu milik negara atau swasta sesuai dengan ketentuan sehingga harga barang/jasa tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya, menurut Dharmakarja (2017), belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Kemendagri (2020), belanja bantuan sosial adalah anggaran yang digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang sifatnya tidak berlanjut (kecuali dalam keadaan tertentu) dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari risiko sosial.

Berdasarkan beberapa referensi tersebut, belanja subsidi dan bantuan sosial pada konteks penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah melalui APBD yang diberikan kepada rumah tangga atau perusahaan/lembaga dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi dari risiko sosial termasuk kesenjangan pendapatan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait hubungan antara pengeluaran pemerintah dan Kesenjangan Pendapatan telah dilakukan di berbagai negara. Penelitian secara global dilakukan oleh Anderson et al. (2017) yang meneliti pengaruh dari belanja pemerintah pada negara berpendapatan rendah dan menengah terhadap Kesenjangan Pendapatan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa belanja pemerintah berhubungan erat dengan penurunan Kesenjangan Pendapatan

dimana hubungan paling kuat terjadi antara belanja kesejahteraan sosial dan belanja sosial lainnya terhadap koefisien gini sebagai ukuran Kesenjangan Pendapatan.

Sidek (2021) juga melakukan penelitian terkait pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap penurunan Kesenjangan Pendapatan di negara maju dan berkembang dengan hasil yang menyatakan bahwa secara umum, pengeluaran pemerintah mengurangi Kesenjangan Pendapatan. Hasil dari negara-negara maju mendukung kurva Kuznet berbentuk U terbalik dimana pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi pada awalnya menyebabkan lebih banyak kesenjangan namun pada akhirnya akan membawa dampak positif setelah mencapai tingkat ambang batas tertentu.

Adapun untuk penelitian di Indonesia memiliki hasil yang beragam. Terbaru ada penelitian dari Abimanyu & Imansyah (2023) yang melakukan penelitian dampak subsidi BBM dan LPG terhadap pemerataan pendapatan masyarakat menggunakan metode *Miyazawa's Input Output*, dengan hasil yang menyebutkan bahwa kelompok berpendapatan rendah menerima manfaat yang lebih sedikit dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi, dan bahkan kelompok teratas pun memperoleh pendapatan tertinggi. Bentuk subsidi harga BBM dan LPG juga memiliki kelemahan karena seluruh kelompok pendapatan dapat membelinya.

Hasil penelitian dari Abimanyu & Imansyah (2023) tersebut juga mendukung penelitian dari Wahyuni et al. (2014) yang meneliti efek dari belanja

pemerintah terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali, penelitian oleh Yasni & Yulianto (2020) yang melakukan penelitian terkait Belanja Modal dan bansos dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia, penelitian oleh Alamanda (2020) yang melakukan penelitian terkait dampak dari belanja pemerintah terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia, dan penelitian oleh Ningtiyas & Nuraini Dwiputri (2021) yang melakukan penelitian kesenjangan pendapatan di Indonesia pada Tahun 2015-2019.

Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Agustin et al. (2023) yang melakukan penelitian terkait dampak dari belanja pemerintah, inflasi, PDRB dan investasi terhadap kesenjangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan di daerah Kalimantan Timur. Perbedaan dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas kemungkinan dapat terjadi karena adanya perbedaan metode atau perbedaan dalam ukuran sampel data atau objek penelitiannya.

Penelitian lainnya terkait dengan belanja subsidi, bantuan sosial, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan juga dilakukan oleh Islami Sari & Marissa (2023), Sukmana (2021), Pradani et al. (2021), dan Sholikah (2022) dengan hasil penelitian yang relatif sama dimana program BLT dan subsidi berpengaruh terhadap pola konsumsi dan distribusi pendapatan di Indonesia.

Melihat hasil dari beberapa penelitian di Indonesia sebelumnya tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja

subsidi dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia saat ini dirasa masih belum maksimal dalam menekan angka kesenjangan pendapatan, namun sebaliknya justru menambah kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini, logika kontekstual yang dibangun adalah pengaruh dari belanja pemerintah pada fungsi sosial terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. Belanja pemerintah pada fungsi sosial yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu belanja bantuan sosial dan subsidi dari APBD, sedangkan ukuran kesenjangan pendapatan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini adalah angka koefisien gini atau rasio gini.

Berdasarkan kajian teori, belanja bantuan sosial dan subsidi memiliki pengaruh negatif terhadap Kesenjangan Pendapatan, artinya kenaikan belanja bantuan sosial dan subsidi seharusnya dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Penjelasan dari konsep teori tersebut adalah bantuan sosial dan subsidi yang berasal dari pungutan pajak masyarakat berpenghasilan tinggi untuk kemudian disalurkan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi dan bertambahnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga akan mengurangi Kesenjangan Pendapatan di masyarakat (teori redistribusi pendapatan) (Rosen & Gayer, 2014)

Adapun jika melihat hasil penelitian empiris terdahulu di Indonesia,

beberapa penelitian ternyata menyimpulkan hasil yang tidak sesuai dengan teori redistribusi pendapatan. Beberapa penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja subsidi dan bantuan sosial justru memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. Namun demikian, hal tersebut ternyata memiliki beberapa alasan diantaranya yaitu penelitian oleh Abimanyu & Imansyah (2023) yang menyebutkan bahwa belanja subsidi di Indonesia memiliki dampak pada naiknya kesenjangan pendapatan disebabkan karena subsidi bahan bakar yang kurang tepat sasaran dan lebih menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Penelitian oleh Yasni & Yulianto (2020) juga menyebutkan bahwa bantuan sosial tidak cukup untuk mengatasi Kesenjangan Pendapatan di Indonesia, sehingga perlu dibarengi dengan perbaikan pada akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar pembangunan.

Merujuk pada Swan & Martin (1994), disebutkan bahwa pembangunan hipotesis penelitian perlu didasarkan pada konsep teoritis yang relevan agar hipotesis memiliki dasar yang kuat dan konsisten. Memperhatikan hal tersebut, maka logika kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini tetap didasarkan pada teori redistribusi pendapatan yang telah dijelaskan di atas, sehingga hubungan kausalitas antar-variabel yang disusun pada pernyataan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1:

H₀: Realisasi belanja subsidi diduga berpengaruh negatif terhadap

kesenjangan pendapatan (koefisien gini) di Indonesia.

H_a: Realisasi belanja subsidi diduga tidak berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan (koefisien gini) di Indonesia.

Hipotesis 2:

H₀: Realisasi belanja bansos diduga berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan (koefisien gini) di Indonesia.

H_a: Realisasi belanja bansos diduga tidak berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan (koefisien gini) di Indonesia.

Hipotesis 3:

H₀: Kebijakan pemerataan ekonomi di Periode Pemerintahan Jokowi dengan menaikkan jumlah belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD diduga berdampak mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.

H_a: Kebijakan pemerataan ekonomi di Periode Pemerintahan Jokowi dengan menaikkan jumlah belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD diduga tidak berdampak mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan merupakan data panel (gabungan data *time-series* dan *cross-section*). Populasi data yang digunakan yaitu 34 Provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 16 tahun (2007-2022). Data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai dokumen dan publikasi instansi pemerintah yang terkait dengan tema penelitian, antara

lain berasal dari Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Situs Badan Pusat Statistik (BPS), dan *Open Data* dari *Website* berbagai Provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula data *Dummy* yang di-*generate* oleh penulis berdasarkan keperluan analisis data. Khusus untuk data Realisasi Belanja (subsidi, bansos, dan modal) dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Log) dikarenakan rentang nilai data yang luas dibandingkan dengan data variabel yang lainnya.

Dalam penelitian ini, beberapa data untuk Provinsi Kalimantan Utara pada periode tertentu tidak tersedia karena Provinsi Kalimantan Utara yang baru dibentuk pada tahun 2012, sehingga mengakibatkan jumlah observasi data berkurang (*unbalanced*). Namun demikian, berdasarkan pengujian menggunakan bantuan Aplikasi Stata 15, diketahui bahwa data pada penelitian ini merupakan kategori sangat seimbang (*Strongly Balanced*) karena jumlah data yang kosong relatif sedikit.

Adapun kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini

didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Alamanda (2020), Yasni & Yulianto (2020), Abimanyu & Imansyah (2023), dan Sari & Marissa (2023) yang meneliti pengaruh belanja pemerintah terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia, sehingga kerangka pemikiran penelitian ini yaitu sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

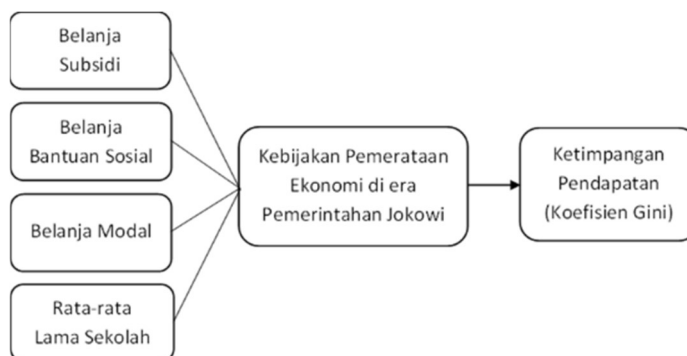
Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) *with Robbust Standard Error* dan *Difference in Differences* (DiD), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Metode *Ordinary Least Square* (OLS) *with Robbust Standard Error*

Analisis data dengan menggunakan metode OLS dengan *Robbust Standard Error* memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya bias yang disebabkan karena terjadinya autokorelasi dan heteroskedistisitas pada data hasil regresi, sehingga dengan menggunakan metode OLS dengan *Robbust Standard Error* uji asumsi klasik dapat diabaikan (Gujarati & Porter, 2008; Wooldridge, 2018).

Dalam merancang model persamaan dengan metode OLS untuk

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Yasni & Yulianto (2020); Alamanda (2020); Abimanyu & Imansyah (2023); Islami Sari & Marissa (2023)

menganalisis pengaruh belanja subsidi dan bantuan sosial terhadap Kesenjangan Pendapatan, digunakan model persamaan yang telah dipakai pada penelitian oleh Alamanda (2020), Yasni & Yulianto (2020), dan Sari & Marissa (2023). Berdasarkan model yang digunakan pada beberapa penelitian tersebut, model persamaan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

$$gini_{it} = \alpha_0_{it} + \alpha_1 ln_subsidi_{it} + \alpha_2 ln_bansos_{it} + \alpha_3 ln_modal_{it} + \alpha_4 pendidikan_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

ln	=	Logaritma natural (log)
$gini$	=	Koefisien Gini Total, Kota dan Desa
$subsidi$	=	Realisasi Belanja Subsidi APBD
$bansos$	=	Realisasi Belanja Bantuan Sosial APBD
$modal$	=	Realisasi Belanja Modal APBD
$pendidikan$	=	Rata-rata lama waktu sekolah
α_0	=	Konstanta
$\alpha_1 \text{ s.d } \alpha_4$	=	Koefisien Variabel Regresi
i	=	Unit Cross-Section (Provinsi di Indonesia)
t	=	Tahun yang diteliti (2007-2022)
ε	=	Error Term/ Residual

b. Analisis Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*) dengan *Difference in Differences (DiD)*

Analisis evaluasi dampak (*impact evaluation*) dilakukan dengan metode *Difference in Differences (DiD)* untuk mengukur dampak dari suatu intervensi, *treatment* atau kebijakan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, analisis DiD digunakan untuk mengukur dampak dari kebijakan pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yang diasumsikan dimulai pada tahun 2015 karena Presiden Jokowi baru dilantik pada bulan Oktober 2014.

Pendekatan analisis dengan metode *DiD* yang digunakan pada penelitian ini mengadopsi pendekatan *DiD* tanpa *covariate* yang dilakukan oleh Hilmawan et al. (2023) melalui persamaan sebagai berikut:

$$gini_{it} = \alpha_{it} + \beta Treat_{it} + \delta_{it} + \gamma(Treat_{it}.t) + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$$\gamma = (gini_{treat,2015-2022} - gini_{control,2015-2022}) - (gini_{treat,2007-2014} - gini_{control,2007-2014})$$

dengan formula $(gini_{treat,2015-2022} - gini_{control,2015-2022})$ merupakan rata-rata dari *treatment effect* yaitu selisih dari grup *treatment* dan grup *control* pada periode setelah *treatment* (2015-2022), sedangkan $(gini_{treat,2007-2014} - gini_{control,2007-2014})$ merupakan selisih dari grup *treatment* dan grup *control* pada periode sebelum *treatment* (2007-2014).

Adapun *treatment* atau intervensi kebijakan pada penelitian ini diukur dengan variabel *Dummy* yaitu Provinsi

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Min	Max	Mean	Std. Deviation
gini_total	536	0,246	0,449	0,357	0,039
gini_kota	536	0,256	0,460	0,363	0,043
gini_desa	520	0,214	0,469	0,309	0,040
subsidi (ribu rupiah)	480	16.000	5.596.366.000	70.748.561	412.735.666
bansos (ribu rupiah)	544	5.267.885	6.528.360.209	364.623.984	683.985.507
modal (ribu rupiah)	543	288.159.855	21.119.933.352	4.624.603.307	3.800.130.173
Pendidikan	538	5,59	11,30	8,35	1,07

Sumber: BPS & DJPK Kemenkeu (diolah peneliti)

yang memiliki realisasi belanja subsidi dan bansos yang lebih besar dari rata-rata nasional diberikan nilai 1, sedangkan kondisi sebaliknya diberikan nilai 0. Selain itu, Variabel *Dummy Waktu* pada penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan periode waktu pemerintahan Jokowi pada tahun 2015-2022 (8 tahun) yang diberi nilai 1, sedangkan periode sebelum *treatment* yaitu tahun 2007-2014 (8 tahun) diberikan nilai 0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Memperhatikan statistik deskriptif pada Tabel 2, dapat diamati bahwa angka rata-rata koefisien gini provinsi di Indonesia adalah sebesar 0,357 dengan angka terendah sebesar 0,246 dimiliki Provinsi Bangka Belitung (2022), dan angka tertinggi sebesar 0,449 dimiliki Provinsi DI Yogyakarta (2022).

Memperhatikan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Indonesia cenderung berbeda-beda. Terdapat provinsi yang memiliki kesenjangan pendapatan yang relatif rendah, sedangkan di sisi lain terdapat provinsi yang memiliki kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi.

Selain itu, berdasarkan data nilai rata-rata koefisien gini di daerah perkotaan dan perdesaan, dapat dilihat pula bahwa rata-rata Kesenjangan Pendapatan di perkotaan lebih besar daripada kesenjangan pendapatan di daerah perdesaan dengan perbedaan sebesar 0,054 poin.

Adapun untuk variabel realisasi belanja subsidi, bantuan sosial, dan modal, dapat diamati bahwa nilai realisasi ketiga jenis belanja APBD tersebut sangat bervariasi di tiap-tiap Provinsi. Untuk belanja subsidi sendiri, terdapat Provinsi yang memiliki realisasi belanja subsidi yang mencapai Rp5,59 Triliun yaitu Provinsi DKI Jakarta, namun juga terdapat provinsi yang realisasi belanja subsidinya hanya puluhan juta seperti di Provinsi Bali dan beberapa provinsi di Pulau Sulawesi.

Demikian pula dengan realisasi belanja bansos dan modal, terdapat provinsi yang memiliki realisasi belanja bantuan sosial dan modal masing-masing hingga Rp6,53 triliun dan Rp21,12 triliun yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, namun di sisi lain terdapat provinsi yang memiliki realisasi belanja bantuan sosial dan modal masing-masing hanya sebesar Rp364 miliar dan Rp4,6 triliun yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Yogyakarta.

Tabel 3 Hasil Regresi OLS dengan Robust Standard Error

Variabel Independen	Variabel Dependen = Koefisien Gini				
	gini_total (2007-2014)	gini_total (2015-2022)	gini_total (2007-2022)	gini_kota (2007-2022)	gini_desa (2007-2022)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konstanta (C)	0,2451* (0,0870)	-0,0545 (0,1461)	0,0172 (0,0629)	0,0499 (0,0741)	0,1694** (0,0731)
ln_subsid	0,0013 (0,0017)	0,0017 (0,0015)	0,0018 (0,0012)	-0,0006 (0,0013)	0,0001 (0,0011)
ln_bansos	-0,0060* (0,0021)	0,0109* (0,0023)	0,0034** (0,0014)	-0,0028*** (0,0017)	0,0002 (0,0016)
ln_modal	0,0117* (0,0030)	0,0045 (0,0057)	0,0093* (0,0022)	0,0154* (0,0026)	0,0076* (0,0021)
Pendidikan	-0,0120* (0,0029)	-0,0048** (0,0024)	-0,0073* (0,0017)	-0,0058* (0,0021)	-0,0100* (0,0023)
Obs. (n)	245	229	474	474	466
R-square	0,1220	0,2592	0,1189	0,0753	0,0779
Prob.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Signifikan pada $\alpha < 1\%$, ** Signifikan pada $\alpha < 5\%$, *** Signifikan pada $\alpha < 10\%$

Sumber: diolah peneliti

Sementara itu, untuk variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) memiliki nilai rata-rata sebesar 8,35 tahun, dengan provinsi yang memiliki rata-rata pendidikan terlama adalah DKI Jakarta dengan nilai sebesar 11,3 tahun, dan provinsi dengan rata-rata pendidikan terpendek adalah provinsi Papua dengan nilai sebesar 5,59 tahun.

Memperhatikan data tersebut, karakteristik pemerintah daerah provinsi di Indonesia memang sangat beragam dan bervariasi sehingga penerapan kebijakan pemerataan ekonomi yang tepat dan efektif merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat.

Hasil Regresi OLS with Robust Standard Error

Analisis regresi OLS digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (belanja subsidi, bansos, modal, dan pendidikan) terhadap

variabel dependen (koefisien gini). Hasil regresi disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil regresi OLS di Persamaan (1) dan (2) pada Tabel 3, diketahui bahwa belanja subsidi dari APBD memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap koefisien gini total baik pada periode 2007-2014, periode 2015-2022 ataupun pada periode 2007-2022. Sedangkan berdasarkan persamaan (4) dan (5), diketahui bahwa belanja subsidi dari APBD memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Koefisien Gini di daerah perkotaan, dan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Koefisien Gini di daerah perdesaan.

Selanjutnya, berdasarkan Persamaan (3), dapat disimpulkan bahwa semakin besar realisasi belanja subsidi, maka kesenjangan pendapatan di provinsi tersebut akan semakin tinggi namun tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 pada Hipotesis (1) ditolak.

Dari hasil estimasi pengaruh belanja subsidi terhadap koefisien gini, dapat disimpulkan bahwa secara umum belanja subsidi berpengaruh positif terhadap koefisien gini baik pada periode Pemerintahan Jokowi maupun pada periode Pemerintahan Sebelumnya meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran Subsidi dari APBD justru mengakibatkan bertambahnya kesenjangan sosial di masyarakat karena subsidi tersebut tidak tepat sasaran sebagaimana penjelasan Abimanyu & Imansyah (2023) yang menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah menerima manfaat dari subsidi lebih sedikit daripada masyarakat berpenghasilan tinggi.

Selanjutnya, untuk belanja bantuan sosial, pada persamaan (1) dapat diketahui bahwa Belanja Bansos memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ terhadap koefisien gini total pada periode 2007-2014. Hal tersebut berarti kebijakan bantuan sosial pemerintah daerah pada Pemerintahan sebelum Jokowi berjalan dengan baik sebagai jaring pengaman sosial sehingga dapat menurunkan angka kesenjangan pendapatan.

Hal yang berbeda terjadi pada Persamaan (2), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 1\%$ terhadap koefisien gini total pada periode 2015-2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan bantuan sosial pemerintah daerah pada Pemerintahan

Jokowi kurang berjalan dengan baik karena penyaluran bansos justru mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan persamaan (4) dan (5), dapat diketahui bahwa realisasi belanja bantuan sosial memiliki pengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan, namun memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan pendapatan di daerah perdesaan meskipun tidak signifikan secara statistik. Sedangkan berdasarkan persamaan (3), dapat disimpulkan bahwa semakin besar realisasi belanja bantuan sosial, maka kesenjangan pendapatan di provinsi tersebut akan semakin tinggi pada periode tahun 2007-2022 sehingga mendukung penelitian Yasni & Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa rasio belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap Kesenjangan Pendapatan meskipun tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 pada Hipotesis (2) juga ditolak.

Adapun untuk belanja modal diperoleh hasil regresi OLS yang konsisten pada persamaan (1) sampai dengan (5) dimana belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap koefisien gini total, perkotaan, perdesaan baik pada periode pemerintahan Jokowi maupun periode pemerintah sebelum Jokowi dan pada periode total.

Hal tersebut berarti bahwa semakin besar realisasi Belanja Modal, maka Kesenjangan Pendapatan relatif semakin besar pula. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Belanja Modal atau infrastruktur dari APBD tidak dapat

diakses secara maksimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mengakibatkan meningkatnya Kesenjangan Pendapatan sebagaimana penjelasan Yasni & Yulianto (2020) yang menyatakan bahwa kurang maksimalnya akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar pembangunan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan. Sedangkan untuk rata-rata Pendidikan (lama sekolah) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai koefisien gini baik pada periode pemerintahan Jokowi maupun periode pemerintah sebelum Jokowi dan pada periode total. Hasil yang sama juga terjadi untuk koefisien gini di daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi rata-rata pendidikan (lama sekolah) suatu provinsi, maka Kesenjangan Pendapatan semakin kecil, sehingga untuk menurunkan angka kesenjangan pendapatan yang, maka pemerintah daerah perlu menaikkan kualitas Pendidikan dari masyarakatnya.

Difference in Differences

Metode analisis selanjutnya menggunakan metode *Difference in Differences* (*DiD*) yang bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan pemerataan ekonomi dari pemerintahan Jokowi. Hasil estimasi dengan metode *DiD* disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil estimasi dengan metode *DiD* pada *Outcome Variable* (1) di Tabel 4, diketahui bahwa pada periode Pemerintah sebelum Jokowi/*before treatment* (2007-2014), Provinsi yang memiliki realisasi Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial lebih besar dari rata-rata nasional memiliki rata-rata

Tabel 4 Hasil Metode *Difference in Differences*
Koefisien Gini Total

Outcome var. (1)	gini _{total}	S. Err.	t	P> t
Before				
Control	0,363			
Treated	0,356			
Diff (T-C)	-0,008	0,005	-1,63	0,104
After				
Control	0,345			
Treated	0,376			
Diff (T-C)	0,031	0,005	6,01	0,000*
DiD	0,038	0,007	5,55	0,000*
Obs. (n)	Before	After	Total	
Control	135	197	332	
Treated	129	75	204	
Total	264	272		
R-Square	0,07			

*Signifikan pada $\alpha < 1\%$, **Signifikan pada $\alpha < 5\%$,

*** Signifikan pada $\alpha < 10\%$

Sumber: diolah peneliti

koefisien gini 0,008 lebih rendah dari Provinsi lainnya. Hal tersebut berarti realisasi Belanja Subsidi dan Bansos yang lebih besar berhasil menurunkan Kesenjangan Pendapatan masyarakat pada periode Pemerintahan sebelum Jokowi. Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil menggunakan metode OLS yang dibahas pada bagian sebelumnya, dimana belanja Bantuan Sosial pada periode tahun 2007-2014 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap koefisien gini di Indonesia.

Selanjutnya, pada *Outcome Variable* (1) di Tabel 4 juga dapat diketahui bahwa pada periode Pemerintahan Jokowi/*After Treatment* (2015-2022), Provinsi yang memiliki

Tabel 5 Hasil Metode *Difference in Differences*
Koefisien Gini Kota

Outcome var. (2)	gini_kota	S. Err.	t	P> t
Before				
Control	0,373			
Treated	0,353			
Diff (T-C)	-0,020	0,005	-3,93	0,000*
After				
Control	0,359			
Treated	0,372			
Diff (T-C)	0,013	0,006	2,19	0,029**
DiD	0,033	0,008	4,26	0,000*
Obs. (n)	Before	After	Total	
Control	135	197	332	
Treated	129	75	204	
Total	264	272		
R-Square	0,04			

*Signifikan pada $\alpha < 1\%$, **Signifikan pada $\alpha < 5\%$,*** Signifikan pada $\alpha < 10\%$

Sumber: diolah peneliti

Tabel 6 Hasil Metode *Difference in Differences*
Koefisien Gini Desa

Outcome var. (3)	gini_desa	S. Err.	t	P> t
Before				
Control	0,316			
Treated	0,301			
Diff (T-C)	-0,016	0,005	-3,27	0,001*
After				
Control	0,300			
Treated	0,334			
Diff (T-C)	0,033	0,005	6,20	0,000*
DiD	0,049	0,007	6,81	0,000*
Obs. (n)	Before	After	Total	
Control	131	197	328	
Treated	125	67	192	
Total	256	264		
R-Square	0,09			

*Signifikan pada $\alpha < 1\%$, **Signifikan pada $\alpha < 5\%$,*** Signifikan pada $\alpha < 10\%$

Sumber: diolah peneliti

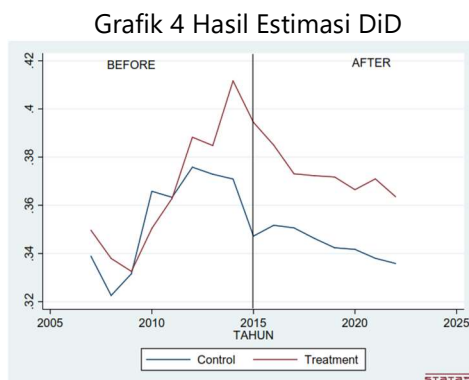
realisasi Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial lebih besar dari rata-rata nasional justru memiliki rata-rata koefisien gini 0,031 lebih besar dari Provinsi lainnya. Hal tersebut berarti realisasi Belanja

Subsidi dan bansos yang lebih besar justru mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi pada periode pemerintahan Jokowi. Hasil tersebut juga sesuai dengan hasil menggunakan metode OLS yang dibahas pada bagian sebelumnya, dimana belanja Bantuan Sosial pada periode tahun 2015-2022 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap koefisien gini di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara periode sebelum dan setelah *treatment*, maka diperoleh nilai *DiD* untuk koefisien gini total adalah sebesar 0,038. Hal tersebut berarti, kebijakan pemerataan ekonomi berupa peningkatan jumlah belanja subsidi dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi justru cenderung mengakibatkan kesenjangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Hasil yang sama juga terjadi pada kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan dan perdesaan sebagaimana dapat dilihat pada *Outcome Variable* (2) dan (3) di Tabel 5 dan 6. Nilai *DiD* untuk koefisien gini kota dan desa masing-masing adalah sebesar 0,033 dan 0,049. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan justru lebih tinggi di daerah perdesaan akibat adanya kebijakan pemerataan ekonomi berupa peningkatan jumlah belanja subsidi dan bantuan sosial di periode pemerintahan Jokowi.

Selanjutnya, hasil metode *DiD* untuk pengaruh belanja subsidi dan bantuan sosial terhadap koefisien gini juga dapat dilihat pada visualisasi Grafik 4. Pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jarak antara garis berwarna biru (*Control Group*) dan garis berwarna



Sumber: Aplikasi Stata (diolah peneliti)

merah (*Treatment Group*) pada periode sebelum pemerintahan Jokowi (2007-2014) cenderung lebih dekat. Namun setelah periode pemerintahan Jokowi (setelah garis tahun 2015), jarak antara garis berwarna biru (*Control Group*) dan garis berwarna merah (*Treatment Group*) semakin menjauh dimana garis merah berada lebih tinggi daripada garis biru, meskipun secara tren kedua grup mengalami penurunan pada periode 2015-2022. Hal tersebut dapat menjelaskan secara visual kesenjangan yang *relative* lebih tinggi di periode pemerintahan Jokowi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 pada Hipotesis (3) juga ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak dari Belanja Pemerintah (Subsidi dan Bansos) terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia selama periode 16 tahun atau pada periode pemerintahan Jokowi dan periode pemerintahan sebelumnya (2007-2022).

Hipotesis diuji dengan melakukan analisis melalui metode *Ordinary Least Square (OLS) with Robbust Standard Error* dan *Difference in Difference (DiD)*. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa H_0 pada Hipotesis (1), (2), dan (3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kebijakan subsidi dan bansos di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan teori redistribusi pendapatan.

Analisis dengan OLS menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi memiliki pengaruh positif terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia meskipun tidak berdampak signifikan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa proses seleksi penerima manfaat produk subsidi belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih banyak masyarakat berpenghasilan tinggi yang tidak seharusnya menikmati produk subsidi tersebut.

Selanjutnya, hasil OLS juga menunjukkan bahwa realisasi Belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. Hasil tersebut menjadi indikasi bahwa kebijakan bantuan sosial pemerintah daerah pada pemerintahan Jokowi kurang berjalan dengan baik karena penyaluran bansos justru mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat diakibatkan karena terdapat penerima dana bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukannya atau kurang tepat sasaran.

Sementara itu, untuk hasil analisis dengan metode DiD menunjukan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi atau *treatment* berupa peningkatan jumlah realisasi belanja subsidi dan bantuan sosial yang dilakukan oleh

pemerintahan Jokowi pada tahun 2015-2022 justru cenderung mengakibatkan Kesenjangan Pendapatan lebih tinggi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya (2007-2014).

Kebijakan, program dan inovasi terkait penyaluran subsidi dan bantuan sosial oleh pemerintahan saat ini sebetulnya sudah relatif baik. Adanya *data verification* penerima Bantuan Sosial pada situs Kementerian Sosial merupakan terobosan yang baik dalam perbaikan *database* penerima bansos. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan subsidi dan bantuan sosial saat ini, diantaranya:

Pertama, pemerintah daerah perlu membangun suatu mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan atau badan usaha penerima subsidi harga produk melakukan verifikasi dan seleksi dalam menjual produknya hanya kepada masyarakat yang membutuhkan sebelum menerima dana Subsidi.

Kedua, meneliti kembali dan menyempurnakan *database* masyarakat penerima manfaat bantuan sosial agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dengan melibatkan *verifikator* dari pihak ketiga Independen.

Ketiga, mengembangkan mekanisme monitoring, evaluasi dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan menyalurkan belanja subsidi dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Keempat, melanjutkan program dan inovasi pemerataan ekonomi yang telah berjalan saat ini untuk mendukung pemerataan secara lebih organik dan terstruktur seperti program Kartu Pra-Kerja, KUR, UMi, dll.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Beberapa implikasi dari penelitian ini yaitu, pertama penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan awal untuk *Policy Evaluation* terkait Subsidi dan Belanja Sosial yang telah dilakukan selama ini. Kedua, penelitian ini juga sebagai bukti empiris yang mendukung hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh Abimanyu & Imansyah, 2023 terkait dampak dari Subsidi BBM dan LPG yang justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Ketiga, penelitian ini dapat juga dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait dampak dari belanja modal dan pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Adapun salah satu keterbatasan penelitian ini adalah belum diperhitungkannya realisasi belanja subsidi dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN karena penelitian ini hanya berfokus pada realisasi belanja subsidi dan bansos yang bersumber dari APBD. Realisasi belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBN sendiri memiliki jumlah yang cukup besar yaitu Rp283,7 triliun dan Rp147,4 triliun. Penelitian lebih lanjut terkait dampak dari belanja subsidi dan bansos yang bersumber dari gabungan APBN dan APBD terhadap pemerataan pendapatan dapat dilakukan untuk hasil yang lebih komprehensif.

Selain itu, perbedaan karakteristik masing-masing provinsi di Indonesia Barat, Tengah dan Timur juga belum diperhitungkan dalam penelitian ini. Penelitian lebih lanjut yang memperhitungkan perbedaan karakteristik masing-masing provinsi

tersebut dapat dilakukan untuk memperkaya hasil analisis.

REFERENSI

- Abimanyu, A., & Imansyah, M. H. (2023). The Impact of Fuel Subsidy to The Income Distribution: The Case of Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(2023), 189–203.
- Agustin, M. S., Mintarti, S., & Defung, F. (2023). Pengaruh inflasi, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kesenjangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(3), 395–405.
- Alamanda, A. (2020). the Effect of Government Expenditure on Income Inequality & Poverty in Indonesia. *Info Artha*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Anderson, E., Jalles D'Orey, M. A., Duvendack, M., & Esposito, L. (2017). Does Government Spending Affect Income Inequality? a Meta-Regression Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 961–987. <https://doi.org/10.1111/joes.12173>
- Arnold, B. C. (2015). Pareto Distribution. *Statistics Reference Online*, 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat01100.pub2>
- Astary, R., Safitri, N., Zarpani, Z., & Harahap, E. F. (2024). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 10(1).
- Bellu, L. G., & Liberati, P. (2005). Charting Income Inequality. The Lorenz Curve. *EASYPol Module 000*, July 2014, 17.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. *Substansi*, 1(2), 374–389.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2008). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 346–359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.29313/amwalun.a.v2i2.3824>
- Kemendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.
- Kuznets, S. (1955). Population, income

- and capital. *Economic Progress: Proceedings of a Conference Held by The International Economic Association at Santa Margherita Ligure, Italy*, 3–20.
- Lorenz, M. O. (1905). Methods of measuring the concentration of wealth. *Publications of the American Statistical Association*, 9(70), 209–219. <https://doi.org/10.1080/15225437.1905.10503443>
- Ningtiyas, N., & Nuraini Dwiputri, I. (2021). Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(7), 670–685. <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p670-685>
- Ota, T. (2017). Economic growth, income inequality and environment: assessing the applicability of the Kuznets hypotheses to Asia. *Palgrave Communications*, 3(1). <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.69>
- Pareto, V. (1906). Applicazioni Della Matematica All'Economia Politica. *Giornale Degli Economisti*, 33, 424–453. <http://www.jstor.org/stable/23222638>
- Pradani, R. F. E., Sarwani, I., Fikri, A. R., & Firdaus, M. (2021). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Langsung Tunai (BST) Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Selama Pandemi Covid-19. In *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* (Vol. 9, Issue 3, pp. 121–128). <https://doi.org/10.26740/jupe.v9n3.p121-128>
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). Public Finance. Global ed. New York.
- Sholikah, N. R. (2022). Pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka serta pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *jurnal pendidikan ekonomi (JUPE)* (Vol. 10, Issue 3, pp. 247–253).
- Sidek, N. Z. M. (2021). Do Government expenditure reduce income inequality: evidence from developing and developed countries. *Studies in Economics and Finance*, 38(2), 447–503. <https://doi.org/10.1108/SEF-09-2020-0393>
- Sitthiyot, T., & Holasut, K. (2021). A simple method for estimating the Lorenz curve. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00948-x>
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 84–92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>
- Spencer, M. H., & Amos Jr, O. M. (1993). *Contemporary Economics, Edisi ke-8*. Worth Publishers, New York.
- Sukmana, H. (2021). Pengaruh bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai selama pandemi Covid-19 terhadap kelangsungan hidup masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 176–186. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5777>
- Swan, J. E., & Martin, W. S. (1994). The

Theory-Setting-Testable
Hypothesis Model: A Framework to
Assist Doctoral Students in Linking
Theory and Empirical Research.
Marketing Education Review, 4(3),
2–15.
[https://doi.org/10.1080/10528008.
1994.11488463](https://doi.org/10.1080/10528008.1994.11488463)

- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(8), 458–477.
- Wooldridge, J. M. (2018). *Introductory Econometrics*. Cengage Learning. Inc.
- Wuladari, S., Azahra, A., Sari, N., Nasution, A., Nisa', F., Komputer, J. I., & Dan Manajemen, E. (2022). Kesenjangan Pendapatan yang Memicu Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen*, 2(1), 238–251.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819>